

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Oligarki merupakan suatu sistem penguasaan sumber daya oleh seseorang atau kelompok kecil (elite). Dengan kata lain, kelompok kecil menguasai banyak orang (masyarakat). Sistem oligarki disebut juga pemerintahan dari atas yakni negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat (sulit).¹

Menilik Siklus Polybius tentang oligarki, berasal dari sistem aristokrasi, yaitu suatu sistem yang dibentuk oleh sekelompok bangsawan melawan tirani raja berkuasa (monarki/dinasti). Seiring waktu bangsawan tersebut (oligarki) mulai tamak dan menindas rakyat sehingga terjadi perlawanan rakyat dengan membentuk kesepakatan sistem yang disebut demokrasi.²

Siklus Polybius menjelaskan sistem oligarki bertentangan dengan sistem demokrasi. Namun pada kenyataannya, oligarki tetap berpengaruh pada lingkungan demokrasi yang dianut suatu negara, bahkan memiliki peran untuk menentukan pemimpin suatu pemerintahan. Oleh karena itu, prinsip demokrasi itu sendiri rentan mengalami kegagalan, karena sistem demokrasi yang dianut suatu negara justru mampu dikuasai oleh sistem oligarki.

¹ Intan Rachmina Koho, "Oligarki Dalam Demokrasi," *Lensa* 4, no. 50 (2021): 60–74.

² Ibid.

Sistem demokrasi berprinsip kedaulatan tertinggi negara ada di tangan rakyat. Prinsip tersebut sesuai dengan pedoman dasar Republik Indonesia yaitu UUD 1945 pasal 1 ayat 2, yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, rakyat memiliki kedaulat mutlak dalam bernegara termasuk memilih pemimpinnya.

Pemilihan umum (pemilu) secara langsung dijadikan sebagai instrumen memilih pemimpin dalam sistem demokrasi. Rakyat memilih langsung pemimpinnya baik tingkat nasional maupun daerah. Namun, partai politik (parpol) memiliki kekuasaan menentukan calon pemimpin yang akan dipilih langsung oleh rakyat.

Konsep memilih pemerintah oleh rakyat sangat sederhana, rakyat cukup memilih langsung pemimpin yang dianggap kompeten. Namun, secara teknis pemilihan pemimpin (pemerintahan) memiliki proses yang sangat rumit, sehingga menyebabkan biaya yang sangat tinggi khususnya bagi peserta pemilu. Proses inilah pemicu munculnya pihak pemilik sumber daya yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi (dikenal dengan oligarki) berperan menentukan siapa calon peserta pemilu.

Oligarki memiliki kekuasaan ekonomi sehingga menggunakannya untuk menguasai politik. Para oligarki menjadi pemodal bagi para kontestan yang bertanding dalam pemilu. Oligarki terlibat langsung pada kontestasi pemilu bahkan tingkat pemilihan kepala daerah (pilkada).³

³ Vedi R. Hadiz and Richard Robison, "Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia," *International Political Science Review* 38, no. 4 (2017): 488–502.

Oligarki menguasai politik melalui parpol, sehingga calon sosok pemimpin terutama di daerah belum tentu keinginan rakyat namun keinginan para oligarki. Misalnya, pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Medan tahun 2020 dimenangkan oleh M. Bobby Afif Nasution (Bobby Nasution) yang merupakan menantu Presiden RI Ir. Joko Widodo. Parpol besar mengukung Bobby Nasution seperti PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Golkar, PAN, Nasdem, Hanura, PSI, dan PPP, karena pengaruh presiden RI yang mampu memenangkan pemilihan presiden 2 (dua) periode, sehingga dianggap memiliki potensi besar berpengaruh memenangkan pilkada Kota Medan 2020 dan kemenangan calon yang diusung merupakan suatu keuntungan kepentingan politik ke depan.

Sosok Bobby Nasution tidak dikenal secara umum oleh masyarakat Kota Medan pada awalnya. Namun, semenjak Bobby Nasution menjadi menantu presiden namanya mulai terkenal. Bahkan, Bobby Nasution direkomendasikan langsung oleh ketua umum (ketum) partai-partai besar untuk menjadi Walikota Medan.

Tokoh-tokoh lokal banyak dianggap layak menjadi Walikota Medan periode 2020-2024 sebelum Bobby Nasution menetapkan dirinya maju sebagai calon Walikota Medan. Sebut saja, Ihwan Ritonga pemilik suara terbanyak pada saat Pileg DPRD Kota Medan 2019. Ihwan Ritonga juga menjabat sebagai ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan saat itu.

Ihwan Ritonga sebagai kader Partai Gerindra sangat dikenal oleh masyarakat Kota Medan. Ihwan Ritonga sempat menyatakan kesiapan menjadi calon Walikota Medan Periode 2020-2024 melalui berbagai media. Bahkan info tersebut dapat dilihat dari banyak baliho bersebaran di Kota Medan yang menunjukkan keipaan Ikhwan Ritongan sebagai calon Walikota Medan.

Ihwan Ritonga berpengalaman dipolitik sebagai mantan Ketum DPC Partai Gerindra Kota Medan dan menjabat sebagai anggota DPRD Kota Medan 2019-2024 serta dikenal sebagai pengusaha sukses dari Kota Medan. Oleh karena itu, Ihwan Ritonga memiliki kapasitas menjadi calon Walikota Medan. Namun, Prabowo Subianto selaku Ketum DPP Partai Gerindra justru merekomendasikan langsung Bobby Nasution sebagai calon Walikota Medan periode 2020-2024 didampingi oleh Aulia Rachman (kader Gerindra DPC Kota Medan) sebagai Wakil Walikota Medan.

Akhyar Nasution dianggap sangat layak menjadi calon Walikota Medan periode 2020-2024. Selain sebagai *incumbent* Akhyar Nasution juga merupakan kader senior PDI Perjuangan. Namun, Megawati Soekarno Putri selaku Ketum DPP PDI Perjuangan merekomendasikan Bobby Nasution sebagai calon Walikota Medan 2020-2024, bahkan memberikan sanksi keras kepada Akhyar Nasution ddalam bentuk pemecatan sebagai anggota PDI Perjuangan karena dianggap tidak patuh terhadap keputusan partai.

Kapasitas yang dimiliki Akhyar Nasution sebagai calon Walikota Medan menarik minat PKS dan Partai Demokrat untuk mengusungnya menjadi Calon Walikota Medan. Salman Alfarisi ditunjuk PKS sebagai wakilnya. Namun pada akhirnya, KPU Kota Medan menetapkan Bobby Nasution dan Aulia Rachman

sebagai pemenang Pilkada Kota Medan periode 2020-2024 setelah proses pemilihan dilakukan.

Berdasarkan data KPU menunjukkan tingkat partisipasi pemilih pada saat pemilihan Walikota Medan 2020 hanya 46 % dari total DPT. Sisanya tidak berpartisipasi terlibat pemilu. Sehingga, suara masyarakat Kota Medan yang tidak memilih jauh lebih banyak daripada suara yang diperoleh pemenang Bobby Nasution dan Aulia Rachman.

Partai Gerindra, PDI Perjuangan dan partai pendukung lainnya tentu memiliki sosok yang lebih kompeten untuk dijadikan calon Walikota Medan 2020-2024. Namun, partai-partai pendukung tersebut justru mengusung Bobby Nasution yang belum teruji sebagai calon Walikota Medan 2020-2024, bahkan, tokoh nasional seperti Sandiaga Uno (Gerindra) dan Djarot Syaiful Hidayat (PDIP) turun langsung sebagai tim sukses pemenangan Bobby dan Aulia. Jadi, dapat dikatakan, kontestasi Pilkada Kota Medan 2020 memiliki kepentingan politik yang sangat besar hingga melibatkan pihak penguasa ekonomi dan politik atau disebut oligarki dalam menentukan calon kontestan.

Pilkada Kota Medan dipilih rakyat secara langsung sudah terlaksana sejak tahun 2005. Namun, baru pada Pilkada Kota Medan tahun 2020 mendapat perhatian hingga melibatkan elit politik nasional yang terlibat secara langsung sebagai tim sukses pemenangan. Hal ini terjadi karena salah satu pasangan calon peserta pilkada merupakan keluarga presiden, yang tentunya memberikan penawaan politik yang baik ke depan.

Pilkada Kota Medan 2020 melibatkan banyak elit politik nasional disinyalir adanya kepentingan oligarki. Namun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Pasal 5 Huruf a menyatakan bahwa “Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan: Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung”⁴. Artinya, Ketum partai memiliki hak prerogatif menentukan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan 2020-2024 dan hal tersebut dilindungi oleh Undang-Undang.

Besarnya kekuasaan ketum parpol menentukan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan akan membuka peluang yang lebih luas kepada oligarki untuk berkuasa. Oligarki hanya perlu menguasai dan mempengaruhi parpol pengusung sehingga akan memberikan *bargaining* politik yang sangat menguntungkan oligarki ke depannya. Oleh karena itu perlu suatu solusi untuk membatasi kekuasaan oligarki dalam Pilkada Kota Medan berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan proses pemilihan pemimpin dipilih langsung oleh rakyat dan sah secara konstitusi dengan prinsip demokrasi. Namun politik oligarki diindikasikan berperan menciptakan pemimpin dalam sistem demokrasi itu sendiri. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti “Politik Oligarki, studi kasus: Pilkada Kota Medan Tahun 2020”.

⁴ UUNo.12 Thn. 2008, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No. 2 Thn. 2004 Tentang Pemerintah Daerah,” 2008.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang menunjukkan bahwa indikasi politik oligarki memiliki peranan menentukan kepala daerah, walaupun negara menganut sistem demokrasi. Kontestan pemenang pilkada dinyatakan sah secara hukum, karena mengikuti tahapan pilkada yang sesuai dengan UU dan aturan pilkada. Oligarki berpotensi menguasai parpol, sedangkan parpol dilindungi oleh hukum.

Kasus pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020 menunjukkan bagaimana penguasa parpol mengusung sosok yang belum teruji menjadi calon Walikota Medan hanya karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan presiden. Padahal, masing-masing partai pengusung memiliki kader parpol sendiri ataupun tokoh-tokoh daerah yang lebih berpengalaman dan teruji. Hal tersebut menunjukkan adanya kepentingan politik oligarki yang sangat tinggi ke depannya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut memunculkan pertanyaan yaitu, bagaimana praktik keterlibatan oligarki dalam Pilkada Kota Medan tahun 2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian maka ditentukanlah tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana praktik keterlibatan oligarki dalam Pilkada Kota Medan tahun 2020.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan informasi penting tentang peran politik oligarki menentukan pemimpin di negara demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan;

1. Bagi masyarakat (kelompok), penelitian ini berguna memberikan wawasan tentang peran oligarki dalam menentukan pemimpin yang dipilih rakyat, dan saran yang diperoleh akan bermanfaat untuk membatasi peran oligarki dalam kontestasi pemilu.
2. Bagi peneliti, penelitian ini berguna menambah wawasan atau pengetahuan tentang ilmu politik.
3. Pembaca dan peneliti berikutnya, penelitian ini berguna sebagai referensi penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian menggambarkan kemampuan penelitian menghasilkan kesimpulan dari rumusan permasalahan penelitian. Sistematika penelitian juga menggambarkan kemampuan penelitian menghasilkan kesimpulan berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Sistematika penelitian memiliki 5 (lima) bab dan setiap bab saling berhubungan, berikut gambaran sistematika penulisan yang dimaksud;

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab I menguraikan secara jelas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II menguraikan tentang penelitian terdahulu, kerangka teori penelitian dan kerangka pemikiran. Uraian tersebut dijadikan sebagai landasan metodologi penelitian, kesimpulan serta saran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III menguraikan tentang pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengolahan data dan lokasi serta jadwal penelitian. Uraian tersebut merupakan langkah teknis menyelesaikan rumusan masalah penelitian.

BAB IV POLITIK OLIGARKI PADA PILKADA KOTA MEDAN TAHUN 2020

Bab IV menguraikan gambaran umum dan keterlibatan oligarki pelaksanaan Pilkada Kota Medan tahun 2020. Gambaran Umum tersebut membahas sejarah Kota medan, sejarah Pilkada Langsung di Kota Medan dan Pilkada Kota Medan Tahun 2020. Sedangkan pada keterlibatan oligarki pada Pilkada Kota Medan tahun 2020 membahas oligarki menguasai partai politik Indonesia, partai politik menentukan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan, oligarki terlibat melalui partai politik pada Pilkada Kota Medan tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Bab V menguraikan tentang kesimpulan penelitian dan memberikan saran hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka ditulis pada akhir penelitian sebagai daftar kumpulan sumber referensi peneliti. Sumber referensi tersebut berasal dari jurnal, buku dan sebagainya, yang mencakup nama peneliti penerbit, tahun terbit, judul dan lain-lain. Daftar pustaka dibuat secara otomatis menggunakan aplikasi Mendeley.

